

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 1



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	KR Jogja

Wilayah: Kabupaten Boyolali

Boyolali Terima WTP Kesepuluh

<https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/klaten/boyolali-terima-wtp-kesepuluh/>



BOYOLALI, KRJOGJA.com – Terhitung dua bulan sejak dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, M Said Hidayat dan Wahyu Irawan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali menerima Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Atas perolehan ini Pemkab Boyolali telah menerima WTP sepuluh kali berturut-turut sejak pemerintahan Bupati Boyolali, Seno Samudro sejak tahun 2012.

Penyerahan LHP LKPD diterima Bupati Said Hidayat pada Jumat (30/04/2020) siang di gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan peserta terbatas serta menerapkan protokol kesehatan. Selain Boyolali pada kesempatan tersebut Pemkab Karanganyar dan Blora turut menerima LHP LKPD dengan raihan opini WTP.

Ketua BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kerjasama Pemerintah Daerah dalam proses pemeriksaan sehingga bekerja secara independen, berintegritas dan profesional.

"Kami atas nama pimpinan BPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD, Bupati dan jajaran atas kerjasama selama ini dalam mendukung kami dalam tugas pemeriksaan. Semoga hasil pemeriksaan ini menjadi motivasi dan dorongan untuk memperbaiki pertanggungjawaban APBD. Bersama kita berusaha berkomitmen mendukung penyelenggaraan keuangan negara yang transparan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat," terang Ayub, Jumat (30/4/2021).

Pihaknya telah mengawali rangkaian pemeriksaan pendahuluan sejak Januari ini dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran informasi dalam laporan keuangan. Opini ini berdasar standar akuntansi pemerintah dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dan efektivitas pengendalian internal.

Sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara salah satu hal yang penting diatur adalah kepala daerah wajib menyusun dan menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD yaitu berupa laporan keuangan yang terlebih dahulu diperiksa BPK.

Sementara Bupati Said Hidayat menyampaikan perolehan WTP kali ini atas kerja keras semua pihak serta jajaran Pemkab Boyolali. Ia berharap hal ini menjadi hadiah bagi masyarakat Boyolali.

"Patut kita syukuri Kabupaten Boyolali kembali memperoleh opini WTP yang kesepuluh kalinya. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran OPD yang memberikan dukungan penuh atas kinerja dan kerjanya yang terus meningkat. Tentunya ini menjadi hadiah bagi masyarakat Kabupaten Boyolali atas penilaian dan kerja yang semakin baik, positif," terangnya.

Pihaknya berpesan, capaian prestasi ini bisa meningkatkan kinerja dalam mendukung pembangunan Boyolali dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, BPK juga menyampaikan bahwa laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan semester II tahun 2020 yang dilakukan Pemkab Boyolali mencapai angka 95,80%. Capaian angka tersebut merupakan yang tertinggi di Jawa Tengah dan nasional di atas rata-rata nasional pada angka 75,60 %. (M-2)

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH